



Peran dan Pergerakan Wanita Masa Penjajahan Belanda dan Jepang (1928 – 1945)

Ardyan Pay Sully

^{1,21}Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Cenderawasih

*Email: ardyanpaysully120@gmail.com

ABSTRACT

*This study examines the roles and movements of Indonesian women during the Dutch colonial period and Japanese occupation from 1928 to 1945. The study employs the historical research method, consisting of four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. During the Dutch colonial period, Indonesian women experienced various forms of social and educational inequality, including limited access to formal education, seclusion, early marriage, and restrictions based on traditional customs. These conditions encouraged educated women to establish schools and organizations aimed at improving women's status and expanding their educational opportunities. The women's movement developed further after the First Indonesian Women's Congress in 1928, leading to greater cooperation among women's organizations and the emergence of demands concerning education, marriage, political representation, voting rights, and Indonesian independence. During the Japanese occupation, however, women's organizations were restricted and reorganized to support Japanese wartime interests. Women were mobilized for social, economic, and military-related activities, while some experienced severe exploitation through the forced system of *Jugun Ianfu*. Therefore, the period demonstrates both the development of women's political consciousness and the severe restrictions imposed upon them under Japanese rule. Despite these challenges, women remained important participants in Indonesia's national movement.*

Kata Kunci: *Women's Movement; Indonesian Women; Dutch Colonialism; Japanese Occupation; Jugun Ianfu.*

PENDAHULUAN :

Pada zaman Hindia Belanda peran perempuan pribumi dalam, masa perlawanan awal terhadap Belanda masih dilakukan secara kedaerahan. Meskipun begitu semangat perjuangan wanita pada zaman itu telah mampu memunculkan tokoh-tokoh wanita yang luar biasa seperti Cut Nya Dien dan Cut Meutia dari Aceh, Martha Christina Tiahahu dari Maluku, dan Nyai Ageng Serang dari Jawa Tengah serta R.A Kartini. Memasuki tahun 1910-an semakin banyak perempuan Indonesia memasuki dunia pendidikan barat dan menjadi anggota elite modern, jumlah mereka memang masih kecil, bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan populasi perempuan Hindia Belanda. Namun sudah terdapat peningkatan. Tahun

1909 anak gadis yang bersekolah disekolah desa berjumlah 3.097 orang, tahun 1914 meningkat 19.455 orang dan terus meningkat pada tahun 1919 berjumlah 36.649. Selain sekolah Kartini, kita juga mengenal sekolah yang dibuka oleh Dewi Sartika di Jawa Barat, Rohana Kudus dan Rahma El Yunusiyah di Sumatera Barat, dan Maria Walanda Maramis di Sulawesi Utara.

Setelah Hindia jatuh ke tangan Jepang, kedudukan wanita semakin terpuruk. Apalagi banyak terjadi penutupan sekolah yang tanpa sebab. Para perempuan pribumi pada saat itu banyak yang direkrut oleh Jepang untuk membantu militer dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya. Jepang juga banyak mendirikan organisasi-organisasi semi militer yang merekrut perempuan. Selain membantu dalam bidang semi militer, para perempuan pada zaman Jepang juga dalam posisi yang memprihatinkan. Pada saat itu pihak Jepang marak mencari perempuan yang masih muda untuk dipekerjakan dimarkas tentara Jepang. Bahkan para perempuan tersebut juga dijadikan budak seks untuk memenuhi kebutuhan biologis tentara Jepang. Berdasar latar belakang kompleknya perjuangan wanita dalam masa Kolonial dan zaman Jepang tersebut, menjadikan penulis ingin mencoba mengupas apa yang sebenarnya terjadi pada kaum perempuan dimasa itu, lewat makalah ini.

METODE :

Metode penelitian ini lebih berfokus pada metode penelitian sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan - tahapan dalam metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu sebagai berikut :

1. **Heuristik** adalah tahap menemukan dan mengumpulkan sumber - sumber sejarah yang mendukung penulisan ini. Peneliti mengumpulkan sumber penelitian ini dari berbagai media seperti buku-buku dan jurnal-jurnal yang mengkaji tentang Perkembangan transportasi berbasis rel di Hindia Belanda
2. **Kritik sumber** adalah tahap menguji kredibilitas sumber tersebut sekaligus menilai apakah sumber tersebut lengkap atau ada bagian hilang. Pada tahap ini peneliti mulai menganalisis kelengkapan dari sumber-sumber yang sudah di kumpulkan
3. **Interpretasi** pada tahap ini akan dilakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh dari data yang valid. Tahap ini peneliti mulai memilah-milah sumber-sumber yang valid dan dapat di percaya dan relevan dengan permasalahan yang sedang di teliti
4. **Historiografi** merupakan tahapan terakhir tujuan dari tahap terakhir ini adalah menyajikan peristiwa sejarah yang benar-benar menceritakan fakta-fakta sejarah yang pernah terjadi dan bukan cerita fiksi semata, selain itu penulisan ini dapat menyimpulkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Pergerakan Wanita pada Masa Penjajahan Belanda Sebelum Tahun 1928

Pada masa perlawanan awal terhadap Belanda yang dilakukan secara kedaerahan di Nusantara, sudah ada beberapa wanita yang turut berperan. Ada sejumlah pahlawan perempuan yang memberontak kepada Belanda seperti Cut Nya Dien dan Cut Meutia dari Aceh, Martha Christina Tiahahu dari Maluku, dan Nyai Ageng Serang dari Jawa Tengah.¹

Di Indonesia, pergerakan kaum perempuan mulai menggelinding sebagian besar karena dibuka oleh pikiran R.A Kartini sampai terbangunnya organisasi-organisasi perempuan mulai tahun 1912.² Kegiatan mereka pada awalnya menekankan pendidikan yang membuka cakrawala kaum perempuan, misalnya memasak, merawat anak, melayani suami, menjahit, dan lain-lain. Lebih jauh dari itu, mereka memberikan pula kesadaran yang belakangan disebut sebagai “emansipasi wanita”, bahwa kaum perempuan sederajat dengan kaum laki-laki. Oleh Soekarno, ini disebut dengan istilah “menyempurnakan keperempuanannya”.³

Pada masa penjajahan Belanda, hanya kalangan pribumi yang memiliki status ekonomi sosial yang tinggi yang dapat mengecap pendidikan. Itu pun perlu diberi catatan bahwa hanya kaum laki-laki yang berhak memperoleh pendidikan Belanda. Pada masa kolonial pendidikan bagi kaum wanita tidak dianggap penting. Wanita hanyalah golongan kelas dua yang berada di bawah golongan laki-laki, kedudukan wanita dianggap tidak sederajat dengan laki-laki. Dalam hal pendidikan wanita hanya memperoleh pendidikan dari lingkungan non formal atau keluarga saja, wanita dididik dan diajarkan bagaimana menjadi ibu dan istri yang harus patuh terhadap kehendak suami.⁴

Kaum perempuan pada masa penjajahan kolonial Belanda posisi dalam kehidupan begitu memprihatinkan. Derajat mereka lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Dalam kehidupan mereka yang sudah akil baliq atau berusia 11-12 tahun harus menjalani pingitan (terutama golongan priyayi) yaitu tidak boleh keluar rumah sebelum dipersunting oleh laki-laki yang hendak menyuntingnya. Secara tidak langsung kebebasan mereka sudah dibatasi, padahal seorang perempuan pada usia tersebut belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan belum matang pemikirannya bagaimana seharusnya menjadi seorang istri yang sesungguhnya. Tidak membedakan mana perempuan keturunan priyayi dan mana keturunan rakyat biasa. Namun perempuan golongan priyayi bisa mengenyam pendidikan meskipun hanya sebentar.

Mengenai keadaan wanita Indonesia pada waktu itu masih ada dalam konservatisme dan sangat terikat oleh adat. Pengajaran di sekolah-sekolah hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki, sedangkan anak-anak perempuan hanya mendapat pendidikan di rumah atau di lingkungan keluarga dan pendidikan yang diperolehnya tidak lebih dari persiapan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik.⁵

¹ Muhadjir Darwin. Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 7 Nomor 3, Maret 2004. Fisipol UGM. Hlm 283.

² Takashi Shiraishi dalam Ruth Indiah Rahayu. Politik Gender Orde Baru. _____ Hlm. 421.

³ *Ibid.*, 422.

⁴ Aris Himawan Setiaji. 2011. Wanita Jawa Dalam Pendidikan Kolonial (Studi Sekolah Van Deventer di Mangkunegaran Surakarta). Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

⁵ Suhartono. Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001. Hlm 27.

Berbeda dengan kaum laki-laki yang tidak ada istilah pingitan dan nikah paksa seperti apa yang dialami kaum perempuan. Kaum laki-laki terutama golongan priyayi dapat menempuh pendidikan yang tinggi karena kelak mereka akan menjadi kepala rumah tangga. Namun tidak untuk kaum perempuan yang harus mau menerima adat saat itu karena perempuan nantinya hanya dianggap sebagai seseorang yang mengurus rumah tangga dan melayani suami tanpa mencari nafkah. Akan tetapi begitulah kenyataannya kehidupan perempuan pribumi pada masa penjajahan Belanda. Bahkan sampai saat ini pun adat seperti itu masih terasa meskipun samar-samar untuk anak-anak perempuan dipedesaan yang minim pendidikan.

Dampak dari perkawinan anak-anak adalah banyaknya perceraian dan poligami serta buruknya kesehatan istri karena melahirkan dalam usia muda. Masalah perkawinan anak ini juga diperdebatkan dalam sidang Volskraad. Namun pemerintah Hindia Belanda sulit bertindak untuk mencegahnya karena banyak berkaitan dengan adat dan kebiasaan. Misalnya ada kebiasaan yang disebut kawin gantung dimana pasangan anak-anak yang sudah menikah tidak akan hidup bersama sebagai pasangan suami istri untuk beberapa waktu lamanya. Lagi pula ada harapan bagi beberapa kalangan bahwa dengan berkembangnya pendidikan dan terjadinya perubahan sosial praktik pernikahan dini akan hilang dengan sendirinya.⁶

Melihat kondisi seperti itu maka bagi kaum wanita pribumi golongan priyayi yang sempat menikmati pendidikan merasa terpancang jiwanya untuk mengangkat derajat kaum perempuan pribumi saat itu. Diantara kaum perempuan yang menjadi pelopor pengangkat derajat kaum perempuan antara lain Dewi Sartika, R.A Kartini, Maria Walanda Maramis, Nyi Hajar Dewantara, dll. Awal mula gerakan-gerakan yang bertujuan mengangkat derajat wanita bermula pada abad ke 19 dan 20 dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum perempuan pribumi.

Memasuki tahun 1910-an semakin banyak perempuan Indonesia memasuki dunia pendidikan barat dan menjadi anggota elite modern, jumlah mereka memang masih kecil, bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan populasi perempuan Hindia Belanda. Namun peran mereka dalam usaha memajukan bangsa dan meningkatkan semangat kebangsaan khususnya dikalangan perempuan tidaklah kecil. Pendidikan untuk anak-anak gadis pun semakin diterima baik oleh masyarakat, khususnya kelas menengah keatas. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada umumnya memang masih terbatas dikalangan tersebut. Suatu hal yang patut diingat bahwa kesempatan memperoleh pendidikan telah membuka cakrawala baru bagi kaum perempuan Indonesia dan mendorong bangkitnya kesadaran untuk bergerak maju, meningkatkan peran dan statusnya dalam masyarakat jumlahnya pun terus meningkat. Tahun 1909 anak gadis yang bersekolah disekolah desa berjumlah 3.097 orang, tahun 1914 meningkat 19.455 orang dan terus meningkat pada tahun 1919 berjumlah 36.649. Selain sekolah Kartini, kita juga mengenal sekolah yang dibuka oleh Dewi Sartika di Jawa Barat, Rohana Kudus dan Rahma El

⁶ Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid V. Jakarta: Balai Pustaka .Hlm 407

Yunusiyah di Sumatera Barat, dan Maria Walanda Maramis di Sulawsi Utara.⁷

Dengan berkembangnya pendidikan di Hindia Belanda untuk kaum perempuan maka tidak menutup kemungkinan muncul organisasi-organisasi gerakan perempuan Indonesia. Organisasi-organisasi ini bertujuan untuk menghimpun atau menggalang kekuatan demi meningkatkan derajat perempuan agar tidak selalu dibawah kaum laki-laki dan memperoleh hak-hak antara lain adalah hak mengenyam pendidikan.

Organisasi perempuan telah banyak berdiri jauh sebelum kemerdekaan, seperti Poetri Mardika yang dibentuk di Jakarta tahun 1912, Keradjanan Amai Setia yang didirikan di Padang Tahun 1914, Pawiyatan Wanito yang didirikan di Magelang tahun 1915, Percintaan Ibu Terhadap Anak Temurun (PIKAT) yang didirikan di Manado tahun 1917, Aisyiyah sebagai organisasi pendamping Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta tahun 1917, Poeteri Boedi Sedjati didirikan di Surabaya tahun 1919.⁸

Yang dianggap sebagai pelopor gerakan perempuan Indonesia adalah Putri Mahardika yang dibentuk pada tahun 1912 di Jakarta atas bantuan Budi Utomo. Tujuan perkumpulan ini adalah memberi bantuan, bimbingan, dan penjelasan kepada paragadis pribumi dalam menuntut pelajaran. Melalui majalah yang diterbitkan yang juga bernama Poetri Mahardika dikemukakan hal yang berguna bagi kaum perempuan untuk menghilangkan rasa rendah diri dan meningkatkan derajatnya. Disamping itu juga dibangkitkan kesadaran perempuan untuk berani bertindak diluar rumah dan menyatakan pendapatnya dimuka umum. Organisasi ini juga memberikan beasiswa kepada gadis-gadis yang ingin maju dan menerima naggota laki-laki. Ketuanya adalah R.A Theresia Sabarudin dibantu oleh Sadikun Tondokusumo, R.A. Sutinah Joyopranoto, dan Rr.Rukmini. Walaupun Putri Mahardika tidak berumur panjang, pengaruhnya cukup besar untuk kaum perempuan pribumi yang berpendidikan.⁹

Selain Putri Mahardika, organisasi perempuan lainnya yang juga bertujuan sama yakni mengangkat derajat perempuan antara lain Aisyah, PIKAT (Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunya), Wanito Utomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Perempuan Indonesia dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan dan Organisasi wanita semasa penjajahan kolonial Belanda adalah bertujuan untuk mengangkat derajat kaum perempuan yang selama ini dibawah kaum laki-laki dan secara otomatis hak-hak perempuan sangat dibatasi. Pada masa kolonial dapat dipahami apabila perempuan dan gerakan perempuan secara bersama-sama dengan gerakan nasionalis membasmi ketidakadilan dari sistem kolonial sekaligus memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesejajaran.¹⁰

B. Peran dan Pergerakan Wanita pada tahun 1928 – 1941

Wanita Indonesia juga terlibat dalam pergerakan-pergerakan bangsa Indonesia yang dilakukan selama kurun waktu 1928-1945. Sesudah berlangsungnya Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28

⁷ *Ibid.*Hlm 404

⁸ Sjarifuddin, Nia. “Peningkatan Keterwakilan Perempuan: Keniscayaan untuk Sebuah Perubahan” dalam Jurnal Perempuan No. 63, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta. 2009. Hlm 30.

⁹ Tim Penulisan Sejarah Nasional Indonesia. *Ibid.*Hlm 412

¹⁰ Muhadjir Darwin. *Ibid.*, Hlm 285.

Oktober 1928, dilaksanakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928.

Pada masa ini kaum wanita berperan dalam mengusahakan persatuan dan kerjasama antara organisasi-organisasi wanita untuk mencapai cita-citanya. Dijiwai oleh Sumpah Pemuda tahun 1928 dan atas inisiatif tujuh organisasi wanita Indonesia, pada tanggal 22 Desember 1928, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta.¹¹ Hasil dari Kongres Wanita yang pertama ini salah satunya adalah badan federasi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) yang kemudian berubah nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Hal yang penting dalam perkembangan PPPI/PPII adalah keputusan bahwa kesatuan pergerakan wanita Indonesia berasaskan kebangsaan dan menyatukan diri sebagai bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia.

Setelah diadakan Kongres Perempuan Indonesia I, ternyata ada beberapa organisasi wanita baru yang belum bergabung dengan PPII. Oleh karena itu, diadakan Kongres Perempuan Indonesia II yang diadakan di Jakarta bulan Juli tahun 1935. Kongres ini lebih menekankan pada persatuan dan kesatuan pergerakan wanita di Indonesia. Selain itu, dalam kongres ini juga dibentuk badan Kongres Perempuan Indonesia (KPI). Setelah terbentuknya Badan KPI, PPII dibubarkan pada bulan September 1935.

Pada tahun 1937, atas usaha beberapa perkumpulan wanita, didirikan “Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-Anak Indonesia” (KPKPAI). Komite tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada wanita dan anak-anak dalam perkawinan, merencanakan suatu peraturan perkawinan dan mendirikan biro konsultasi.¹² KPKPAI ini pada awalnya adalah suatu biro yang berdiri sendiri. Namun, pada Kongres Perempuan Indonesia III yang diadakan di Bandung pada bulan Juli 1938, KPKPAI dijadikan suatu badan kongres. Badan tersebut diberi nama Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP).

Sebagai hasil dari Kongres Perempuan Indonesia ke III tahun 1938, Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan hak untuk dipilih (*passief kiesrecht*) kepada kaum wanita. kemudian, dipilih 4 orang wanita sebagai anggota Dewan Kota (*Gementee Raad*), yaitu:

1. Ny. Emma Puradireja di Bandung
2. Nn. Sri Oemiyati di Cirebon
3. Ny. Sunaryo Mangunpuspito di Semarang
4. Ny. Siti Sundari Sudirman di Surabaya

Ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk Komisi Visman pada tahun 1941, diminta pendapat 2 orang wanita Indonesia. Kedua wanita tersebut yaitu Ny. Sunarjo Mangunpuspito yang mengajukan tuntutan Indonesia Berparlemen dan Ny. Sri Mangunsarkoro menuntut Indonesia Merdeka.

Kongres Perempuan Indonesia ke IV diadakan di Semarang pada bulan Juli 1941. Kongres ini mengusulkan kepada anggota Indonesia di Dewan Rakyat agar Bahasa Indonesia dimasukkan sebagai

¹¹ Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1978. Hlm 30.

¹² Ibid., Hlm 31.

mata pelajaran tetap di sekolah menengah. Selain itu, tuntutan Indonesia Berparlemen dan pemberian hak wanita Indonesia untuk memilih (*actief kiesrecht*) juga menjadi putusan Kongres ini. Kongres juga mendukung penolakan GAPI terhadap rancangan ordonasi militer terbatas yang ditawarkan pemerintah Hindia Belanda.

C. Peran dan Pergerakan Wanita pada Masa Jepang (1942 – 1945)

Saat pendudukan Jepang, semua perkumpulan, termasuk organisasi perempuan dilarang, kecuali yang dibuat untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Kaum perempuan dimasukkan untuk memperkuat garis depan dan belakang. Tugas di garis depan berupa bantuan palang merah, penyelenggaraan dapur umum, membuat kaos kaki. Sedangkan tugas garis belakang berupa menanam kapas untuk bahan pakaian, mengurus tanaman dan hewan.¹³

Pada periode ini, sifat gerakan wanita mengalami kemunduran, karena organisasi wanita hanya boleh berdiri bila ada komando dari penguasa. Organisasi-organisasi wanita dibentuk oleh pemerintah Jepang hanya untuk keperluan Jepang dan bersifat kemiliteran. Wanita banyak dilatih untuk ikut kemedan tempur. Tentara pendudukan Jepang juga membentuk pasukan tempur wanita yang disebut Barisan Srikandi yang anggotanya terdiri atas anak-anak gadis berumur antara 15-20 tahun dan belum menikah.

Pada era Jepang ini, perempuan memperoleh kesempatan untuk melakukan tempaan mental dan fisik di bawah tekanan Jepang. Sambil tetap terus berupaya menggalang persatuan dengan sesama pejuang perempuan secara sembunyi-sembunyi karena wadah/organisasi pemersatu mereka sudah diberangus oleh Jepang.¹⁴

Organisasi wanita pada waktu itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari organisasi-organisasi umum tadi. Pergerakan wanita masa pendudukan Jepang tidak mendapat kemajuan, karena kegiatan dibatasi oleh pemerintah Jepang. Kedudukan wanita, baik dalam hukum perkawinan maupun mengenai hak untuk memilih, tidak dibicarakan lagi. Pergerakan wanita sangat prihatin terhadap gadis-gadis korban tentara Jepang, tetapi mereka tidak berani menentang terus terang tindakan-tindakan tersebut.

Sebagian besar wanita pada masa itu terpaksa ikut dalam masa pergerakan. Mau tidak mau mereka sampai di pelosok-pelosok daerah. Berbagai macam kegiatan seperti latihan militer, PPPK, memasak untuk dapur umum, dan lain-lain, telah menambah dan memperluas pengalaman wanita sebagai pimpinan organisasi dan masyarakat. organisasi umum tadi adalah sebagai berikut:

a. Gerakan Isteri Tiga A

Gerakan Tiga A yang dibentuk pada April 1942, mempunyai bagian wanita, yaitu: Gerakan Isteri Tiga A, diantaranya dipimpin oleh Ny. Artinah Samsudin. Bagian pemudinya dari gerakan Tiga A, organisasi ini tidak lama usianya.

¹³ Liza Hadiz (editor), "Partisipasi dan Kesetaraan Politik Gender dalam Pembangunan, dalam Liza Hadiz, Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru (Jakarta: LP3ES, 2004),. Hlm 422.

¹⁴ Muhadjir Darwin. Ibid., Hlm 286.

b. Barisan Pekerja Perempuan Putera

Setelah gerakan Tiga A dibubarkan, dibentuk organisasi baru yang bernama Putera (Pusat Tenaga Rakyat) pada bulan Maret 1943. Organisasi Putera baik di pusat maupun daerah mempunyai bagian perempuan yang bernama Barisan Pekerja Perempuan Putera. Organisasi pusat dipimpin oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito, dibantu Ny. Sunaryati Sukemi, Ny. Sukanti Suryocondro, Ny. Burdah Yusupandi, dan Ny. S.K. Trimurti. Barisan Pekerja Perempuan ini menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf, memintal benang, dan macam-macam kerajinan tangan.

Pemerintah daerah di beberapa tempat juga mendirikan organisasi wanita dengan nama Fujinkai. Organisasi itu diketuai oleh istri kepala daerah yang bersangkutan. Fujinkai harus menggerakkan tenaga-tenaga wanita di tempatnya masing-masing.

c. Jawa Hokokai Fujinkai

Setelah organisasi Putera dilebur dalam organisasi baru Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa), dibentuk departemen wanita yang disebut Jawa Hokokai Fujinkai. Usaha yang dilakukan Fujinkai pada masa itu adalah:

5. Mengobarkan semangat cinta tanah air dan bangsa di kalangan wanita dan menanamkan nasionalisme.
6. Mengajukan agar suka berkorban dan rela menderita untuk tanah air dan bangsa.
7. Menyiapkan tenaga untuk ikut serta di belakang garis pperangan.
8. Mengajukan hidup dan berhemat.
9. Memperbanyak hasil bumi dengan menanami semua tanah yang terluang dengan tanaman penghasil bahan makanan dan pakaian, antara lain ubi, ubi kayu, kapas, jarak, dll.
10. Menghidupkan pekerjaan tangan dan industri di rumah antara lain memintal benang, membuat kaos kaki.
11. Mengadakan latihan-latihan yang diperlukan.
12. Menghidupkan pekerjaan untuk memberantas pengangguran

D. Sisi Kelam Wanita pada Masa Pendudukan Jepang

Periode penjajahan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945, menjadi masa yang paling kelam dan brutal bagi para perempuan dan remaja Indonesia di masa itu. Perang menyeret mereka untuk melewati dan mengalami masa nasib yang mengerikan dalam sejarah peradaban manusia. Hak asasi mereka sebagai manusia dirampas dan dihancurkan oleh militer Jepang.¹⁵

Praktik jugun ianfu pertama kali diadakan balatentatra Jepang di Korea, wilayah yang dikuasainya sejak akhir abad ke-19. Korea juga menyumbangkan kontingen jugun ianfu terbesar, dimana sekitar 200.000 orang wanita dari negeri itu pernah dijadikan budak seks oleh tentara Jepang.¹⁶

¹⁵ Eka Hindra dan Koichi Kimura, Momoye, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 3.

¹⁶ Nino Oktorio, Konflik Bersejarah dalam Cengkeraman Dai Nippon, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013),

Jugun Ianfu menjadi momok pula bagi para perempuan pribumi pada saat itu.

Istilah Jugun Ianfu kalau diartikan secara harafiah menjadi Ju=ikut, Gun= militer/balatentara, sedangkan Ian=penghibur, dan Fu=Perempuan, dengan demikian arti seluruhnya “Perempuan penghibur yang ikut militer”. Dapat dikatakan bahwa istilah Jugun Ianfu merupakan istilah halus untuk perempuan-perempuan yang dipaksa bekerja sebagai budak seks yang ditempatkan di barak-barak militer atau bangunan yang dibangun di sekitar markas militer Jepang selama Perang Pasifik.¹⁷

Sistem perekrutan Jugun Ianfu pada umumnya dipaksa dengan cara-cara kekerasan, tipu muslihat dan ancaman. Kebanyakan dari para calon Jugun ianfu itu bahkan sama sekali tidak tahu menahu tentang tawaran pekerjaan yang sesungguhnya akan mereka terima. Yang mereka tahu hanyalah akan bekerja untuk Jepang dan bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Sistem rekrutmen seorang Jugun Ianfu dilakukan secara tertutup. Pemerintah Militer Jepang menggunakan bantuan pejabat daerah seperti lurah, camat dan melalui tonarigumi.¹⁸

Para perempuan yang dijadikan Jugun Ianfu dimasukkan ke dalam rumah-rumah bordil ala Jepang. Tempat itu biasanya dijaga ketat oleh tentara Jepang. Setiap hari, tiap siang dan tengah malam, asrama selalu dikontrol dan diawasi oleh Kampei-tai.¹⁹ Setiap perempuan yang tinggal di asrama tersebut diberi satu kamar per orangnya. Selain itu nama mereka juga diganti menjadi nama Jepang, misalnya Mardiyem diganti menjadi Momoye.

Sebelum menjalani tugas sebagai budak seks, perempuan-perempuan menjalani pemeriksaan kesehatan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui secara pasti kesehatan dari calon Jugun Ianfu. Perlakuan tentara Jepang kepada para Jugun Ianfu sangat tidak manusiawi. Sampai-sampai dalam satu bulan hanya ada satu hari libur bagi mereka. Seperti pernyataan Mardiyem yang pada saat itu tinggal di asrama Telawang.

“Walaupun tinggal dipusat kota, kami tidak dapat bebas ke luar asrama. Cikada menetapkan peraturan setiap bulan sekali pada tanggal 8 adalah hari libur dan semua penghuni boleh keluar asrama. Kalau kami akan pergi ke luar asrama minimal harus dalam jumlah tiga orang dan diikuti oleh jongos agar tidak ada yang melarikan diri.”²⁰

Ada juga prosedur yang diterapkan Jepang agar para anggota sipil dan militer bisa bersama Jugun Ianfu. Tamu yang datang tidak bisa sembarangan masuk ke kamar-kamar. Semuanya diatur dan diawasi oleh pengelola asrama. Jam tamu siang hari antara pukul 12.00-17.00 khusus untuk serdadu pangkat rendah Jepang dengan karcis seharga 2,5 yen. Kalau sore hari pukul 17.00-24.00 khusus untuk orang sipil Jepang dengan harga karcis 3,5 yen. Mulai pukul 24.00 sampai pagi dikenai karcis seharga 12,5 yen. Biasanya pada jam itu banyak dipakai oleh serdadu Jepang berpangkat perwira.²¹

Sejak Jepang menyerah pada sekutu, secara berangsur-angsur pengunjung tetap asrama Jugun

Hlm. 115

¹⁷ Ibid., Eka Hindra. Hllm. 228

¹⁸ Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 68.

¹⁹ Ibid., Eka Hindra. Hlm. 105.

²⁰ Ibid., hlm. 122.

²¹ Ibid., hlm. 106-107

Ianfu semakin menurun. Rasa senang juga sempat melintas di benak para Jugun Ianfu karena mereka bisa agak bebas. Namun mereka juga merasa ada sesuatu yang aneh, sampai-sampai hanya tinggal para Jugun Ianfu dan jogos yang ada di asrama. Kepala asrama dan semua orang Jepang bahkan tidak diketahui keberadaanya. Mulai saat itulah mereka mencoba untuk pergi dari asrama dan melanjutkan hidupnya. Meskipun begitu para mantan Jugun Ianfu yang telah terbebas itu, masih dihindangi rasa bersalah hingga sekarang akibat kekejaman tentara Jepang yang membuat cerita kelam dalam hidup mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN:

Pergerakan perempuan Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang mengalami perkembangan yang dinamis. Pada masa kolonial Belanda, perempuan pribumi pada umumnya berada dalam posisi sosial yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Keterbatasan pendidikan, praktik pingitan, perkawinan usia muda, serta tuntutan adat yang menempatkan perempuan terutama sebagai istri dan ibu menjadi faktor yang membatasi ruang gerak perempuan. Kondisi tersebut kemudian mendorong munculnya kesadaran untuk meningkatkan kedudukan perempuan melalui pendidikan dan organisasi. Tokoh-tokoh seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis, Rohana Kudus, dan Rahma El Yunusiyah berperan dalam membuka kesempatan pendidikan bagi perempuan.

Perkembangan pendidikan kemudian menjadi salah satu fondasi munculnya organisasi-organisasi perempuan. Sejak berdirinya Poetri Mardika pada 1912, berbagai organisasi perempuan muncul dengan tujuan meningkatkan pendidikan, kedudukan, dan hak-hak perempuan. Setelah Kongres Perempuan Indonesia I pada 22 Desember 1928, gerakan perempuan semakin terorganisasi dan mulai menempatkan perjuangan perempuan sebagai bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Perjuangan tersebut berkembang dari persoalan pendidikan menuju isu perlindungan perempuan dan anak, perkawinan, keterwakilan politik, hak memilih, serta cita-cita Indonesia berparlemen dan Indonesia merdeka.

Berbeda dengan masa Belanda, pendudukan Jepang menyebabkan ruang gerak organisasi perempuan mengalami kemunduran. Organisasi perempuan yang sebelumnya berkembang dibatasi dan hanya diperbolehkan apabila mendukung kepentingan perang Jepang. Perempuan diarahkan untuk menjalankan berbagai kegiatan seperti dapur umum, Palang Merah, produksi kebutuhan perang, pertanian, hingga pelatihan semi-militer. Meskipun demikian, keterlibatan tersebut secara tidak langsung memberikan pengalaman baru bagi sebagian perempuan dalam kegiatan organisasi dan kehidupan masyarakat.

Sisi paling kelam dari periode pendudukan Jepang adalah eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan melalui praktik Jugun Ianfu. Perempuan direkrut melalui paksaan, tipu muslihat, dan ancaman, kemudian ditempatkan di rumah-rumah bordil militer yang diawasi secara ketat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan pada masa pendudukan Jepang tidak hanya kehilangan ruang

politik, tetapi juga mengalami perampasan hak dan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, periode 1928–1945 menunjukkan dua kecenderungan yang berlawanan: perkembangan kesadaran dan organisasi perempuan pada masa akhir kolonial Belanda, serta pembatasan dan eksploitasi perempuan pada masa pendudukan Jepang. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, keterlibatan perempuan dalam pendidikan, organisasi sosial, politik, dan perjuangan kebangsaan menjadi bagian penting dari proses perubahan kedudukan perempuan sekaligus perkembangan nasionalisme Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eka Hindra dan Koichi Kimura. (2007). Momoye. Erlangga

Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). (1978). Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia. Balai Pustaka.

Hadiz, Liza (editor), (2024) Partisipasi dan Kesetaraan Politik Gender dalam Pembangunan, dalam Liza Hadiz, Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru. LP3ES,

Oktorio, Nino. (2013). Konflik Bersejarah dalam Cengkeraman Dai Nippon. Elex Media Komputindo

Rahayu, Ruth Indah. (1996). Politik Gender Orde Baru. LP3ES

Suhartono. (2001). Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945. Pustaka Pelajar.

Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. (2010). Sejarah Nasional Indonesia Jilid V. Balai Pustaka .

Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. (2010). Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Balai Pustaka.

Artikel Jurnal

Adiyanto, Johannes. Purnawati, Hery Setiawan. & Atyanta, Andhika (2026). Architectural Implication of Colonial Infrastructure. ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur. 11(1). 175-188.

Daradjati, Keke Pahlevi. (2021). Bersiasat Melawan Saudara Tua: Mobilisasi dan Resistensi Perempuan Indonesia pada Masa Penjajahan Jepang. Lembaran Sejarah. 19(1). 38 – 57.

Muhadjir Darwin. (2004). Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu 7(4). Fisipol UGM..

Pratiwi, Farah Mega. (2023). Pemberdayaan Perempuan oleh Rezim Militer Jepang dalam Surat Kabar *Asia Raya* 1942–1945.” *DIAKRONIK: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sejarah*. 17(1). 39 – 48.

Sari, Riska Widya, Tri Yudianto & Dadan Adi Kurniawan. (2021). Peranan Organisasi Istri Sedar terhadap Pergerakan Kaum Perempuan Indonesia (1930–1942).” *Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*. 21(1). 31 – 50.

Tesis/disertasi

Aris Himawan Setiaji. 2011. Wanita Jawa Dalam Pendidikan Kolonial (Studi Sekolah Van Deventer di Mangkunegaran Surakarta). Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.